

DARUD DA'WAH WAL IRSYAD DAN PRODUKSI OTORITAS ISLAM LOKAL DI DESA SIBOWI (1975–2025)

DARUD DA'WAH WAL IRSYAD AND THE PRODUCTION OF LOCAL ISLAMIC AUTHORITY IN SIBOWI VILLAGE (1975–2025)

Mutiara Eka Putri

Jurusan Sejarah Peradaban Islam

Universitas Islam Negeri Datokarama – Palu

Email: mutiaraekaputri.9977@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) dalam membentuk dan mempertahankan otoritas Islam lokal di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sejak 1975 hingga 2025. Artikel ini memandang DDI sebagai aktor historis yang beroperasi dalam relasi kuasa sosial, keagamaan, dan pendidikan di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada sumber lisan, arsip komunitas, dan literatur sekunder, penelitian ini menelusuri genealogi masuknya DDI ke Sibowi, perkembangan lembaga pendidikannya, serta perannya dalam membangun legitimasi keagamaan di tengah masyarakat pedesaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi DDI di Sibowi tidak semata-mata disebabkan oleh keberhasilan pendidikan formal, melainkan oleh kemampuannya mengintegrasikan dakwah, pendidikan, dan otoritas moral dalam satu struktur kelembagaan yang relatif tanpa kompetisi dari organisasi Islam lain. Artikel ini berargumen bahwa DDI di Sibowi merepresentasikan pola produksi otoritas Islam lokal yang bersifat adaptif, teritorial, dan berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan historiografi Islam lokal di Sulawesi Tengah dengan menempatkan organisasi keagamaan sebagai subjek analisis kuasa, bukan sekadar agen dakwah.

Kata kunci: *Darud Da'wah Wal Irsyad; Islam lokal; otoritas keagamaan; sejarah Islam; Desa Sibowi; Sulawesi Tengah*

Abstract

This article examines the role of Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) in shaping and sustaining local Islamic authority in Sibowi Village, Tanambulava Subdistrict, Sigi Regency, Central Sulawesi Province, from 1975 to 2025. This article considers DDI as a historical actor operating within intersecting relations of social, religious, and educational power at the local level. Employing historical methods based on oral sources, community archives, and secondary literature, the study traces the genealogy of DDI's arrival in Sibowi, the development of its educational institutions, and its role in constructing religious legitimacy within a rural society. The findings demonstrate that DDI's dominance in Sibowi cannot be attributed solely to the success of formal education; rather, it stems from its capacity to integrate da'wah, education, and moral authority within a single institutional structure, operating in a context with minimal competition from other Islamic organizations. This article argues that DDI in Sibowi represents an adaptive, territorial, and sustainable mode of local Islamic authority production. The study contributes to the historiography of local Islam in Central Sulawesi by positioning religious organizations as subjects of power analysis rather than merely as agents of religious propagation.

Keywords: *Darud Da'wah Wal Irsyad; local Islam; religious authority; Islamic history; Sibowi Village; Central Sulawesi*

PENDAHULUAN

Kajian sejarah Islam di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan kuat untuk menempatkan organisasi Islam sebagai agen pendidikan dan dakwah yang bersifat normatif. Dalam banyak studi, organisasi keagamaan dipahami terutama melalui kontribusinya terhadap penyebaran ajaran Islam, pembangunan lembaga pendidikan, dan pembinaan moral umat. Pendekatan semacam ini, meskipun penting, sering kali mengabaikan dimensi historis organisasi Islam sebagai aktor sosial yang beroperasi dalam relasi kuasa, negosiasi otoritas, dan pembentukan struktur sosial di tingkat lokal.¹ Akibatnya, sejarah Islam lokal—terutama di wilayah pedesaan di luar pusat-pusat Islam besar—kerap direduksi menjadi narasi institusional yang deskriptif dan minim analisis kritis.

Dalam historiografi Islam Indonesia, perhatian akademik masih didominasi oleh kajian jaringan ulama, pesantren besar, dan organisasi Islam dengan jangkauan nasional.² Sementara itu, dinamika Islam di ruang lokal sering diposisikan sebagai perpanjangan dari pusat, bukan sebagai arena produksi otoritas keagamaan yang otonom. Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa otoritas Islam di tingkat lokal tidak selalu dibentuk oleh struktur organisasi pusat, melainkan oleh kemampuan aktor dan lembaga keagamaan mengakar dalam konteks sosial, budaya, dan geografis tertentu.³ Dalam konteks ini, organisasi Islam lokal perlu dibaca sebagai subjek sejarah yang aktif membentuk dan mempertahankan legitimasi keagamaannya sendiri.

Desa Sibowi di Kecamatan Tanambulava, Sulawesi Tengah, menghadirkan kasus yang signifikan untuk membaca ulang peran organisasi Islam dalam sejarah lokal. Sejak pertengahan dekade 1970-an, Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) berkembang sebagai organisasi Islam yang mengelola hampir seluruh pendidikan keagamaan formal di desa tersebut, mulai dari Raudhatul Athfal hingga Madrasah Aliyah. Berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Tengah yang menjadi basis kuat organisasi Islam lain, khususnya Al-Khairat, Sibowi justru menunjukkan dominasi tunggal DDI dalam lanskap pendidikan dan dakwah Islam. Fakta ini tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai preferensi keagamaan masyarakat, melainkan sebagai hasil dari proses historis yang melibatkan jaringan ulama, kesepakatan teritorial dakwah, serta dukungan sosial masyarakat setempat.

Masuknya DDI ke Desa Sibowi berkaitan erat dengan peran Anre Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai pendiri DDI, serta kesepakatan informal pembagian wilayah dakwah dengan Al-Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua),

¹ Azyumardi Azra, *Islam nusantara, jaringan global dan lokal*, Cet. 1 (Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2002), 3–7.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), 1–15.

³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 23–27.

pendiri Al-Khairat.⁴ Kesepakatan tersebut memberi ruang bagi DDI untuk berkembang tanpa kompetisi organisasi Islam lain di Sibowi. Selain itu, dukungan tokoh lokal melalui wakaf tanah dan partisipasi masyarakat memperkuat posisi DDI sebagai institusi keagamaan utama di desa tersebut. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan agama, tetapi juga sebagai infrastruktur sosial yang menopang otoritas keagamaan jangka panjang.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa dominasi DDI di Desa Sibowi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberhasilan institusi pendidikan Islam, melainkan sebagai proses produksi otoritas Islam lokal yang berlangsung secara historis. Melalui pengelolaan pendidikan formal, aktivitas dakwah, dan pembinaan sosial-keagamaan, DDI membentuk habitus keislaman masyarakat sekaligus memproduksi elite lokal yang berafiliasi dengan nilai dan struktur organisasi tersebut.⁵ Dengan demikian, DDI berfungsi sebagai institusi kuasa simbolik yang mengintegrasikan pendidikan, dakwah, dan legitimasi moral dalam satu struktur kelembagaan yang relatif stabil.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber lisan, arsip komunitas, dan literatur sekunder. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan terhadap DDI tidak hanya sebagai organisasi formal, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Desa Sibowi. Dengan menempatkan DDI sebagai subjek analisis sejarah Islam lokal, artikel ini bertujuan memperkaya historiografi Islam di Sulawesi Tengah serta mendorong pembacaan yang lebih kritis terhadap peran organisasi keagamaan dalam pembentukan otoritas dan kuasa di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis peran Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) dalam membentuk dan mempertahankan otoritas Islam lokal di Desa Sibowi, Sulawesi Tengah, pada rentang waktu 1975–2025. Metode sejarah dipilih karena memungkinkan penelusuran proses historis yang bersifat jangka panjang, termasuk perubahan peran organisasi keagamaan dalam konteks sosial dan kultural masyarakat pedesaan.⁶ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada rekonstruksi peristiwa, tetapi juga pada pemaknaan relasi kuasa, legitimasi, dan praktik sosial yang menyertai keberadaan organisasi Islam di tingkat lokal.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sejarah sosial Islam, dengan menempatkan organisasi keagamaan sebagai aktor historis yang beroperasi dalam jaringan relasi sosial, pendidikan, dan dakwah. Dalam kerangka ini, DDI tidak

⁴ Ahmad Rasyid A. Said, *Darud Dakwah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso: Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Baru: esantren DDI Mangkoso, 2009), 41–44.

⁵ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 1. publ. in paperb., repr (Cambridge: Polity Press, 2009), 170–74.

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 89–92.

diperlakukan semata sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan sebagai institusi yang memproduksi otoritas keagamaan melalui praktik keseharian, pembinaan moral, dan pengelolaan pendidikan Islam.⁷ Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap peran organisasi Islam dalam membentuk struktur sosial dan religius masyarakat desa.

Sumber penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi wawancara lisan dengan tokoh pendidikan, tokoh agama, pengelola lembaga DDI, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam perkembangan DDI di Desa Sibowi. Selain itu, digunakan pula arsip komunitas berupa dokumen kelembagaan, foto-foto lama, serta catatan internal lembaga pendidikan DDI. Sumber lisan diperlakukan sebagai ingatan sosial (*social memory*) yang merekam pengalaman kolektif masyarakat terkait keberadaan dan peran DDI, dengan tetap mempertimbangkan subjektivitas dan posisi sosial para informan.⁸

Sumber sekunder mencakup skripsi, buku, dan artikel ilmiah yang membahas sejarah Darud Da'wah Wal Irsyad, perkembangan pendidikan Islam di Sulawesi, serta kajian historiografi Islam lokal di Indonesia. Literatur ini digunakan untuk menempatkan temuan penelitian dalam konteks historiografi yang lebih luas sekaligus sebagai alat pembandingan terhadap narasi lokal yang diperoleh dari sumber primer.

Analisis data dilakukan melalui tahapan kritik sumber dan interpretasi historis. Kritik sumber mencakup kritik eksternal untuk menilai konteks dan keabsahan sumber, serta kritik internal untuk menguji konsistensi dan kredibilitas informasi. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan menghubungkan data empiris dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Desa Sibowi.⁹ Proses ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana pendidikan dan dakwah dijalankan sebagai infrastruktur utama produksi otoritas Islam lokal.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk historiografi analitis, yaitu penulisan sejarah yang tidak berhenti pada deskripsi kronologis, tetapi menekankan hubungan kausal, pola keberlanjutan, dan makna sosial dari keberadaan DDI di Desa Sibowi.¹⁰ Dengan pendekatan ini, artikel ini berupaya menempatkan organisasi Islam lokal sebagai subjek sejarah yang aktif, bukan sekadar latar institusional dalam narasi perkembangan Islam di Sulawesi Tengah.

PEMBAHASAN

⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 23–27.

⁸ Jan Vansina, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology* (New Brunswick, N.J: Aldine Transaction, 2006), 12–15.

⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 203–6.

¹⁰ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, II (Yogyakarta: Ombak, 2020), 61–65.

Masuknya Darud Da'wah Wal Irsyad ke Desa Sibowi

Masuknya Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) ke Desa Sibowi tidak dapat dipahami sebagai proses ekspansi kelembagaan yang bersifat administratif semata, melainkan sebagai bagian dari dinamika penyebaran Islam melalui jaringan ulama dan kesepakatan dakwah di Sulawesi pada paruh kedua abad ke-20. Kehadiran DDI di Sibowi sejak pertengahan 1970-an merupakan hasil dari relasi personal antar-ulama, dukungan elite lokal, serta konteks sosial pedesaan yang relatif terbuka terhadap otoritas keagamaan berbasis pendidikan.

Secara historis, DDI lahir dari tradisi pendidikan Islam Ahlusunnah wal Jamaah yang dibangun oleh Anre Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sejak akhir 1930-an. Sejak berdirinya secara formal pada 1947, DDI berkembang melalui jaringan madrasah dan pesantren yang menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia.¹¹ Pola penyebaran ini tidak selalu mengikuti logika ekspansi organisasi modern, tetapi lebih sering bergerak melalui permintaan masyarakat lokal dan inisiatif tokoh-tokoh agama setempat yang memiliki hubungan dengan jaringan ulama DDI.

Dalam konteks Desa Sibowi, skripsi ini menunjukkan bahwa masuknya DDI berkaitan erat dengan kesepakatan teritorial dakwah antara pendiri DDI dan pendiri organisasi Islam lain yang telah lebih dahulu berkembang di Sulawesi Tengah. Wilayah Sibowi, meskipun secara kultural berada dalam kawasan yang kemudian dikenal sebagai basis kuat Al-Khairat, justru berkembang sebagai ruang dakwah dan pendidikan DDI. Kesepakatan informal ini memperlihatkan bahwa penyebaran organisasi Islam di tingkat lokal tidak selalu berlangsung dalam bentuk kompetisi terbuka, tetapi sering kali melalui pembagian wilayah pengaruh yang didasarkan pada relasi personal dan etika dakwah antar-ulama.¹²

Faktor penting lain dalam genealogi DDI di Sibowi adalah dukungan tokoh lokal melalui mekanisme wakaf tanah dan partisipasi sosial masyarakat. Tanah wakaf yang diberikan oleh Hj. Sunusi—seorang tokoh masyarakat yang memiliki hubungan personal dengan jaringan ulama DDI—menjadi basis material bagi berdirinya lembaga pendidikan DDI di desa tersebut. Dukungan ini menandai fase awal institusionalisasi DDI di Sibowi, di mana pendidikan dijadikan pintu masuk utama untuk membangun kehadiran Islam yang terorganisasi dan berkelanjutan.

Sejak awal berdirinya, DDI di Sibowi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keagamaan masyarakat. Pengelolaan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas dalam satu kawasan menciptakan pola keberlanjutan kaderisasi, di mana peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan agama, tetapi juga disosialisasikan ke dalam nilai,

¹¹ A. Said, *Darud Dakwah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso: Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, 21–30.

¹² Azra, *Islam nusantara, jaringan global dan lokal*, 44–47.

etos, dan struktur otoritas DDI.¹³ Pola ini memperlihatkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai medium utama produksi otoritas Islam lokal, bukan sekadar sarana transmisi ilmu.

Dengan demikian, genealogi masuknya DDI ke Desa Sibowi menunjukkan bahwa dominasi organisasi ini bukanlah hasil dari proses alamiah atau kebetulan sejarah. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari konfigurasi historis yang melibatkan jaringan ulama, kesepakatan dakwah, dukungan elite lokal, serta strategi pendidikan yang terintegrasi. Membaca proses ini secara historis memungkinkan kita memahami bagaimana organisasi Islam lokal membangun legitimasi dan otoritasnya secara bertahap dalam ruang sosial pedesaan Sulawesi Tengah.

Pendidikan Sebagai Infrastruktur Otoritas Islam Lokal

Perkembangan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Desa Sibowi memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak berfungsi netral sebagai sarana transmisi ilmu agama semata, melainkan sebagai infrastruktur utama pembentukan dan reproduksi otoritas Islam lokal. Sejak awal berdirinya lembaga pendidikan DDI pada pertengahan 1970-an, pendidikan dijadikan medium strategis untuk menanamkan nilai, membangun loyalitas sosial, serta membentuk habitus keislaman masyarakat desa secara berkelanjutan.

Model pendidikan yang dikembangkan DDI di Sibowi—mulai dari Raudhatul Athfal hingga Madrasah Aliyah dalam satu kawasan yang sama—menciptakan sistem pendidikan berjenjang yang relatif tertutup dari pengaruh eksternal. Pola ini memungkinkan peserta didik mengalami proses sosialisasi keagamaan yang panjang dan konsisten di bawah satu otoritas kelembagaan. Dalam konteks sejarah Islam lokal, sistem semacam ini bukan sekadar persoalan efisiensi pendidikan, tetapi merupakan mekanisme penting dalam produksi otoritas simbolik, di mana nilai dan tafsir keislaman tertentu dilembagakan sejak usia dini.¹⁴

Keberadaan “sekolah satu atap” juga berimplikasi pada minimnya ruang kompetisi otoritas keagamaan di tingkat lokal. Tidak adanya lembaga pendidikan Islam alternatif di Desa Sibowi—terutama dari organisasi Islam lain—menjadikan DDI sebagai satu-satunya rujukan formal dalam pendidikan dan dakwah. Kondisi ini memperkuat posisi DDI sebagai institusi yang mendefinisikan batas-batas keislaman normatif di ruang sosial desa. Dalam perspektif sejarah sosial Islam, dominasi semacam ini memungkinkan organisasi keagamaan membentuk apa yang dapat disebut sebagai *orthodoxy lokal*, yakni standar keislaman yang diterima secara luas karena terlembagakan melalui pendidikan.

Selain membentuk peserta didik, pendidikan DDI di Sibowi juga berfungsi sebagai sarana produksi elite lokal. Guru, kepala sekolah, dan pengelola lembaga

¹³ van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, 89–93.

¹⁴ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 170–74.

pendidikan DDI umumnya berasal dari lingkungan internal organisasi atau memiliki afiliasi ideologis yang kuat dengan nilai-nilai DDI. Proses ini menciptakan siklus reproduksi sosial, di mana lulusan DDI kembali mengisi posisi strategis dalam struktur pendidikan dan keagamaan desa. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya melahirkan individu berpengetahuan agama, tetapi juga aktor-aktor sosial yang memperpanjang keberlanjutan otoritas DDI.

Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Sibowi, pendidikan Islam memiliki bobot sosial yang tinggi karena berkaitan langsung dengan harapan mobilitas sosial dan legitimasi moral. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga DDI tidak hanya mengharapkan penguasaan ilmu agama, tetapi juga pembentukan karakter dan status sosial yang diakui secara kolektif.¹⁵ Kepercayaan ini memperkuat posisi DDI sebagai institusi yang mengatur bukan hanya aspek keagamaan, tetapi juga orientasi sosial masyarakat desa.

Membaca pendidikan DDI di Sibowi sebagai infrastruktur otoritas Islam lokal memungkinkan kita melihat bahwa kekuatan organisasi ini tidak terletak semata pada jumlah lembaga atau murid, melainkan pada kemampuannya mengintegrasikan pendidikan ke dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan menjadi ruang di mana nilai, disiplin, dan otoritas keagamaan direproduksi secara rutin dan berkesinambungan. Dalam kerangka ini, DDI berfungsi sebagai institusi historis yang membentuk lanskap Islam lokal melalui praktik pendidikan yang terlembagakan.

Dakwah dan Pembentukan Legitimasi Moral Islam Lokal

Selain melalui pendidikan formal, Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Desa Sibowi membangun dan mempertahankan otoritas Islam lokal melalui praktik dakwah yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Dakwah dalam konteks ini tidak beroperasi sebagai aktivitas ceramah semata, melainkan sebagai mekanisme legitimasi moral yang menempatkan DDI sebagai rujukan utama dalam persoalan keagamaan dan etika sosial desa.¹⁶ Praktik ini memperlihatkan bagaimana organisasi Islam lokal memproduksi otoritas tidak hanya lewat institusi pendidikan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam ruang sosial masyarakat.

Aktivitas dakwah DDI di Sibowi berlangsung secara rutin dan melekat pada siklus kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan keagamaan berbasis komunitas. Kehadiran pengurus dan guru DDI dalam kegiatan-kegiatan tersebut memperkuat posisi mereka sebagai figur otoritatif yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari warga. Dalam

¹⁵ van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, 94–98.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Identitas politik umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 63–66.

perspektif sejarah sosial Islam, keterlekatan dakwah dengan praktik sosial semacam ini merupakan kunci bagi keberlanjutan otoritas keagamaan di tingkat lokal.

Legitimasi moral DDI juga dibangun melalui peran simbolik para guru dan tokoh agama yang diasosiasikan dengan lembaga tersebut. Para aktor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai penengah dalam persoalan sosial dan rujukan etis dalam pengambilan keputusan komunitas. Dalam masyarakat pedesaan seperti Sibowi, figur keagamaan yang hadir secara konsisten dalam ruang sosial memiliki kekuatan legitimasi yang sering kali melampaui otoritas formal negara. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana otoritas Islam lokal dibentuk melalui relasi personal dan kepercayaan sosial yang terakumulasi secara historis.

Praktik dakwah DDI di Sibowi juga berkontribusi pada pembentukan standar keislaman normatif di tingkat desa. Melalui pengajian dan pembinaan keagamaan, nilai-nilai Ahlusunnah wal Jamaah yang menjadi basis ideologis DDI dilembagakan sebagai rujukan utama dalam praktik keagamaan masyarakat.¹⁷ Proses ini tidak berlangsung secara koersif, melainkan melalui pengulangan, pembiasaan, dan penerimaan sosial yang luas. Dalam kerangka ini, dakwah berfungsi sebagai instrumen penting dalam membangun apa yang dapat disebut sebagai *moral consensus*—kesepakatan nilai keagamaan yang diterima sebagai kewajiban sosial.

Ketiadaan organisasi Islam lain yang menjalankan dakwah secara terstruktur di Desa Sibowi semakin memperkuat posisi DDI sebagai satu-satunya produsen legitimasi moral Islam lokal. Tidak adanya kompetisi dakwah menjadikan tafsir dan praktik keislaman yang dikembangkan DDI sebagai standar dominan yang jarang dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di tingkat lokal tidak selalu ditentukan oleh superioritas teologis, melainkan oleh keberhasilan organisasi dalam menguasai ruang sosial secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dakwah DDI di Desa Sibowi dapat dipahami sebagai bagian integral dari strategi historis pembentukan otoritas Islam lokal. Pendidikan menyediakan basis institusional dan kaderisasi jangka panjang, sementara dakwah memperkuat legitimasi moral melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Kombinasi kedua praktik ini menjelaskan mengapa DDI mampu bertahan dan mendominasi lanskap keislaman Desa Sibowi dalam rentang waktu yang panjang.

DDI dan Pola Otoritas Islam Lokal Dalam Historiografi

Temuan mengenai dominasi Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Desa Sibowi memperkuat argumen bahwa organisasi Islam lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai perpanjangan dari pusat-pusat otoritas keagamaan, melainkan sebagai

¹⁷ A. Said, *Darud Dakwah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso: Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, 85–89.

produsen otoritas Islam yang bekerja secara relatif otonom dalam konteks sosial tertentu. Dalam historiografi Islam Indonesia, kecenderungan untuk membaca organisasi Islam sebagai struktur nasional sering kali menutupi variasi praktik keagamaan di tingkat lokal.¹⁸ Kasus Sibowi menunjukkan bahwa otoritas Islam justru dibentuk melalui keterlekatan organisasi dengan ruang sosial pedesaan, bukan semata melalui afiliasi struktural ke pusat.

Dalam studi-studi klasik tentang Islam Indonesia, perhatian besar diberikan pada jaringan ulama transregional dan peran pusat-pusat pendidikan Islam besar.¹⁹ Pendekatan ini penting untuk memahami sirkulasi ide dan otoritas keilmuan, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan bagaimana Islam dijalankan dan dilegitimasi di tingkat desa. Penelitian ini sejalan dengan kritik terhadap historiografi yang terlalu “top-down” dalam membaca sejarah Islam, dengan menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan di Sibowi dibangun melalui praktik pendidikan dan dakwah yang terlembagakan secara lokal.²⁰

Temuan ini memiliki kemiripan dengan studi tentang pesantren dan otoritas keagamaan di Jawa, yang menunjukkan bahwa kekuatan lembaga Islam terletak pada kemampuannya membangun relasi sosial jangka panjang dengan masyarakat sekitar.²¹ Namun, berbeda dari pesantren besar di Jawa yang sering beroperasi dalam jaringan kompetitif antar-lembaga, DDI di Sibowi justru berkembang dalam situasi minim kompetisi organisasi Islam. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya otoritas Islam lokal yang relatif homogen dan stabil, suatu pola yang jarang disorot dalam literatur sejarah Islam Indonesia.

Dalam konteks Sulawesi, beberapa penelitian menekankan pentingnya peran ulama lokal dan organisasi keagamaan dalam membentuk wajah Islam di kawasan timur Indonesia.²² Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung berfokus pada figur ulama karismatik atau momen dakwah awal, bukan pada proses institusionalisasi otoritas Islam dalam jangka panjang. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan formal yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dominasi keagamaan organisasi Islam lokal.

Lebih jauh, temuan tentang “sekolah satu atap” di Sibowi memperkaya diskusi tentang pendidikan Islam sebagai instrumen kuasa simbolik. Sejumlah studi

¹⁸ Azra, *Islam nusantara, jaringan global dan lokal*, 1–7.

¹⁹ Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, 12–20.

²⁰ Michael Francis Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton [N.J.] Oxford [England]: Princeton University Press, 2011), 5–9.

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*, Cet. 8 rev (Jakarta: LP3ES, 2011), 89–97.

²² Ahmad Najib Burhani, “Defining Indonesian Islam. An examination of the construction of the national Islamic identity of traditionalist and modernist Muslims,” dalam *Islam In Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: ICAS / Amsterdam University Press, 2013), 25–49.

menunjukkan bahwa pendidikan agama berfungsi tidak hanya sebagai sarana transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan habitus dan reproduksi struktur sosial.²³ Dalam kasus DDI, pendidikan memungkinkan organisasi ini membentuk generasi Muslim yang secara kultural dan simbolik terikat pada nilai-nilai kelembagaan DDI. Pola ini memperlihatkan bagaimana pendidikan menjadi sarana utama produksi otoritas keagamaan yang bersifat laten namun efektif.

Aspek dakwah yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat juga memperkuat posisi DDI sebagai rujukan moral utama. Studi tentang dakwah di masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan sering kali dibangun melalui kehadiran sosial yang konsisten, bukan melalui argumentasi teologis abstrak.²⁴ Temuan ini sejalan dengan kasus Sibowi, di mana otoritas moral DDI terakumulasi melalui keterlibatan rutin dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat desa.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa dominasi DDI di Sibowi bukanlah anomali, melainkan representasi dari pola otoritas Islam lokal yang bersifat adaptif, teritorial, dan berbasis institusi. Artikel ini memperluas historiografi Islam Indonesia dengan menempatkan organisasi Islam lokal sebagai aktor sejarah yang membentuk lanskap keislaman melalui pendidikan dan dakwah yang terlembagakan, bukan sekadar sebagai agen penyebaran ajaran agama.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa keberadaan dan dominasi Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Desa Sibowi, Sulawesi Tengah, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberhasilan lembaga pendidikan Islam atau jasa dakwah keagamaan. Sebaliknya, DDI berfungsi sebagai aktor sejarah Islam lokal yang secara aktif memproduksi dan mempertahankan otoritas keagamaan melalui integrasi pendidikan, dakwah, dan legitimasi moral dalam ruang sosial pedesaan. Dengan membaca DDI sebagai subjek sejarah, artikel ini menempatkan organisasi Islam lokal dalam kerangka analisis kuasa dan otoritas, bukan sekadar institusi normatif.

Genealogi masuknya DDI ke Sibowi memperlihatkan bahwa penyebaran Islam di tingkat lokal tidak selalu berlangsung melalui kompetisi antar-organisasi, melainkan melalui jaringan ulama, kesepakatan teritorial dakwah, dan dukungan elite lokal. Kesepakatan informal antar-tokoh agama, wakaf tanah, serta penerimaan sosial masyarakat menciptakan kondisi awal yang memungkinkan DDI berkembang tanpa rivalitas kelembagaan yang signifikan. Konfigurasi historis ini menjadi fondasi bagi terbentuknya otoritas Islam lokal yang relatif homogen dan stabil.

²³ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Nachdr., Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010), 72–80.

²⁴ Kuntowijoyo, *Identitas politik umat Islam*, 61–66.

Analisis terhadap pendidikan sebagai infrastruktur utama otoritas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan DDI tidak berfungsi netral. Sistem pendidikan berjenjang dalam satu kawasan memungkinkan proses sosialisasi keagamaan yang panjang, konsisten, dan terlembagakan. Melalui pendidikan, DDI membentuk habitus keislaman sekaligus mereproduksi elite lokal yang terikat secara ideologis dan simbolik pada nilai-nilai organisasi. Pendidikan, dalam konteks ini, berperan sebagai mekanisme reproduksi sosial dan otoritas keagamaan jangka panjang.

Sementara itu, praktik dakwah DDI di Sibowi berfungsi sebagai instrumen legitimasi moral yang memperkuat otoritas simbolik organisasi. Keterlibatan rutin para guru dan tokoh DDI dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat menjadikan mereka rujukan utama dalam persoalan etika dan keagamaan. Legitimasi ini tidak dibangun melalui paksaan, melainkan melalui kehadiran sosial yang berkelanjutan dan penerimaan kolektif masyarakat desa. Ketiadaan organisasi Islam alternatif yang menjalankan dakwah secara terstruktur semakin memperkuat posisi DDI sebagai produsen standar keislaman normatif di tingkat lokal.

Secara historiografis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan sejarah Islam Indonesia dengan menekankan pentingnya membaca organisasi Islam lokal sebagai produsen otoritas yang bekerja dalam konteks sosial spesifik. Temuan dari Desa Sibowi menunjukkan bahwa otoritas Islam tidak selalu mengalir dari pusat ke pinggiran, tetapi dapat dibangun dan dipertahankan secara otonom melalui praktik pendidikan dan dakwah yang terlembagakan di tingkat lokal. Dengan demikian, studi ini mendorong pergeseran perspektif dari historiografi Islam yang berorientasi pusat menuju pembacaan yang lebih kontekstual dan berlapis terhadap dinamika Islam lokal.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa sejarah Islam di Sulawesi Tengah—dan Indonesia secara lebih luas—tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhitungkan peran organisasi Islam lokal dalam membentuk lanskap keagamaan masyarakat. Kasus DDI di Desa Sibowi menunjukkan bahwa kekuatan organisasi Islam tidak hanya terletak pada jaringan struktural atau ideologi teologisnya, tetapi pada kemampuannya mengintegrasikan pendidikan, dakwah, dan legitimasi sosial dalam praktik keseharian masyarakat. Perspektif ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan tentang variasi otoritas Islam lokal di wilayah lain, sekaligus memperkaya khazanah historiografi Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Said, Ahmad Rasyid. *Darud Dakwah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso: Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Barru: Esantren DDI Mangkoso, 2009.

- Azra, Azyumardi. *Islam nusantara, jaringan global dan lokal*. Cet. 1. Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2002.
- . *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. 1. publ. in paperb., Repr. Cambridge: Polity Press, 2009.
- . *Outline of a Theory of Practice*. Nachdr. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 16. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Burhani, Ahmad Najib. "Defining Indonesian Islam. An examination of the construction of the national Islamic identity of traditionalist and modernist Muslims." Dalam *Islam In Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam: ICAS / Amsterdam University Press, 2013.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Cet. 8 rev. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Kartodirjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. II. Yogyakarta: Ombak, 2020.
- . *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kuntowijoyo. *Identitas politik umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- . *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- . *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Laffan, Michael Francis. *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*. Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton [N.J.] Oxford [England]: Princeton University Press, 2011.
- Vansina, Jan. *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology*. New Brunswick, N.J.: Aldine Transaction, 2006.